

Determinan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Muhamad Yamin Noch¹

Melyanus Bonsapia²

Andarias Patiran³

Harry A. Tuhumury⁴

Victor Pattiasina⁵

^{1,4-5} **Universitas Yapis Papua**

^{2,3} **Universitas Ottow Geissler Papua**

victorpattiasina6@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 2, No. 2, September 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

This study examines the Performance Determinants of Local Government Agencies in Papua Province. The test was conducted using a sample of 77 respondents. Sampling used is purposive sampling. Data collection through surveys. Multiple linear regression that can be used to test the hypothesis. The results of this study indicate that regional financial management affects the performance of government agencies in the Papua Provincial Government, the Regional Financial Accounting System does not affect the performance of government agencies in the Papua Provincial Government. Good governance has no effect on the performance of government agencies in the Papua Provincial Government and finally regional financial management, regional financial accounting systems, supervision and good governance simultaneously have a positive and significant effect on the performance of government agencies in the Papua Provincial Government.

Keywords : *Regional Financial Management, Regional Financial Accounting System, Supervision, Good Governance and Performance of Government Agencies*

Pendahuluan

Pemerintah daerah telah mendapatkan kekuasaan untuk mengatur secara individu program pemerintahan yang dikelola dalam otonomi daerah dengan berdasarkan regulasi yang berlaku. Otonomi daerah adalah merupakan salah satu upaya pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan daerah melalui peningkatan pelayanan, peran serta masyarakat dan pemberdayaan daerah. Realita menunjukan bahwa walaupun telah banyak dilakukan namun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam kurun waktu 2013-2018 bertumbuh dengan lambat yakni hanya sebesar 1.32% per tahun. Sumbangsih IPM Provinsi Papua sendiri sampai tahun 2018 adalah sebesar 60.06 point yang tercatat sebagai yang terendah di Indonesia.

Pemerintah Pusat menyoroti penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh pemerintah Kabupaten dan Kota Papua, yang sampai saat ini ditandai masih kerap mengalami keterlambatan, Sehingga diharapkan menjadi perhatian semua pihak terkait, untuk selanjutnya dapat ditetapkan sesuai jadwal dalam aturan perundang-undangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan bahwa total untuk belanja tidak langsung sebesar 59.61 persen, sementara yang langsung 40.39 persen. Ini tentu tidak sehat dan dapat diartikan dalam membangun sebuah rumah, tentu lebih besar biaya tukang dibanding bahan bangunan itu sendiri. Sehingga kedepannya diharapkan hal seperti ini yang perlu mendapat penguatan pengawasan dari aparaturnya terkait di daerah, sehingga nanti dalam penyajian pelaporan keuangan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (<https://www.bpk.go.id> 2021).

Sementara persoalan masalah pengawasan otonomi daerah saat ini belum berjalan secara optimal sehingga menilai pemutahiran data dirasakan sangat penting dan menjadi agenda rutin. Kegiatan ini juga sangat strategis karena sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah. Sehingga harapannya kepala daerah dapat melakukan pemantauan dan pemutahiran data tindak lanjut hasil pembinaan pengawasan dari inspektorat (<https://www.papua.go.id> 2021).

Permasalahan ini diatas ada beberapa determinan yang berpotensi berdampak pada kinerja pemerintah daerah khususnya menyangkut pengelbaan keuangan daerah. Regulasi keuangan daerah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menguraikan bahwa yang dimaksudkan dengan pengelbaan keuangan daerah adalah

kegiatan-kegiatan termasuk; perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Bukti empiris hasil penelitian menyangkut hal ini telah banyak dipublikasikan tetapi dengan hasil yang berbeda-beda. (Fatahurrazak, 2018) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah sementara hasil kajian lainnya oleh (Ilyas, 2020) hasil menunjukkan bahwa bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah yaitu sistem akuntansi keuangan daerah. Hidayat, (2015) menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah bagian dari akuntansi sektor publik yang menginput dan juga dapat melaporkan segala transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Pernyataan diatas dapat didukung oleh penelitian (Almanda, 2013) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berdampak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Faktor ketiga yaitu pengawasan yang oleh (Siagian, 2007) dinyatakan sebagai proses pengamatan dari seluruh kegiatan dengan tujuan untuk menjamin tingkat konsistensi antara kegiatan-kegiatan yang telah dikerjakan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hasil kajian empiris oleh (Nugroho, 2018) membuktikan bahwa pengawasan berdampak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Selanjutnya faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah yaitu *good governance*. (Putri, 2016) menyatakan bahwa *good governance* merupakan korelasi yang strategis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Tamaela *et. al.*, (2020) menyatakan bahwa implikasi dari adanya tuntutan *good governance* melahirkan adanya desentralisasi keuangan dan otonomisasi daerah sebagai bagian dari agenda reformasi yang memiliki potensi dampak terhadap kinerja pemerintah. Pernyataan juga diperkuat oleh bukti kajian empiris oleh (Claraini, 2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung *good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

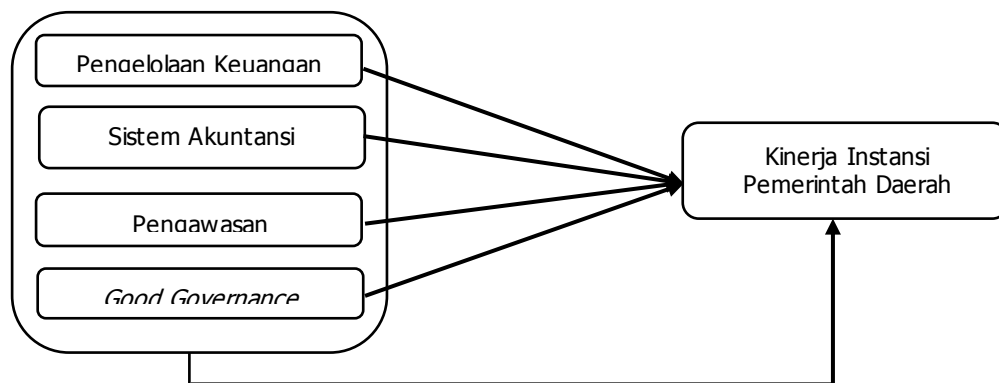
Berdasarkan konsep dan hasil kajian-kajian empiris diatas terlihat bahwa ada ketidak konsistensi dalam sebuah penelitian yang dapat memotivasi peneliti sehingga dapat dilakukan penelitian ulang dengan menggabung kerangka pemikiran dalam penelitian empiris diatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis dampak determinan (pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan,

pengawasan dan *good governance*) terhadap kinerja instansi Pemerintahan Daerah Provinsi Papua.

Kajian Pustaka Dan Pengembangan Hipotesa Penelitian

Model konseptual kajian Determinan Kinerja instansi Pemerintahan Daerah Provinsi Papua ini terlihat berikut ini.

Kerangka Konseptual



Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Proses tata kelola keuangan berpotensi meningkatkan kinerja instansi Pemerintah daerah, karena berfokus pada korelasi antara dana yang dianggarkan dengan hasil-hasil yang ingin dicapai. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua berorientasi pada sasaran yang baik dan juga proses pengalokasian dana. Andarias Patiran Victor Pattiasina, Muhamad Yamin Noch, Saling, (2021) menyatakan bahwa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik sehingga kinerja yang di harapkan pemerintah Provinsi Papua dapat meningkat. Dimana program pengelolaan keuangan yang berkaitan antara yang direncanakan dan yang diinginkan dapat tercapai. Pernyataan ini didukung oleh penelitian (Sari, 2020) yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas. Pernyataan ini berbeda dengan hasil kajian oleh (Ilyas, 2020) yang mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₁ : Pengelolaan keuangan daerah berdampak terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Sistem Akuntansi keuangan dapat menjalankan prinsip akuntansi yang telah kukuhkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan kebijakan akuntansi. Standar akuntansi pemerintah merupakan sebuah dasar yang harus ditaati oleh sebuah sistem tata kelola akuntansi berdasarkan didalam suatu instansi pemerintahan karena akan berdampak pada baik buruknya kinerja instansi pemerintah. (Andarias Patiran Victor Pattiasina, Muhamad Yamin Noch, Saling, 2021). Hal ini dapat dijustifikasi bahwa dengan tidak adanya sistem akuntansi yang memadai akan menimbulkan rendahnya objektivitas informasi yang digunakan dan tidak relevan dalam pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Fatahurrazak, 2018) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki dampak terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₂ : Sistem Akuntansi keuangan berdampak terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Pemeriksaan intern dilakukan dalam rangka memudahkan pegawai pemerintah daerah untuk melakukan tanggungjawabnya dan juga menganalisis, dan penilaian atas operasional pemerintah daerah serta mengajukan saran untuk perbaikan atas penyimpangan yang ditemukan. Fungsi ini bertanggungjawab memonitor kinerja pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan masa yang lalu, dan penilaian atas semua program atau kegiatan operasional pemerintah daerah. Sehingga oleh Rohman, (2009) dikatakan bahwa penting untuk bersinergi dengan Pemerintah daerah sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa dengan adanya pengawasan bagi instansi-instansi pada pemerintah Provinsi Papua secara baik sudah dimonitoring semua program-program maupun kegiatan operasional pada pemerintah Provinsi Papua pada semua tingkatan, yang mana pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi sehingga kinerja instansi pemerintah Provinsi Papua bisa terhindar dari penyimpangan atas kinerja yang diinginkan. Hal ini didukung oleh hasil kajian (Sari,

2020) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

H₃ : Pengawasan berdampak terhadap kinerja instansi pemerintahan daerah.

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Implementasi dari *good governance* dapat diprioritaskan agar menampilkan aspirasi dari masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa pengelolaan Pemerintah Provinsi Papua yang kurang baik dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat atau pihak lainnya, salah satu contohnya adalah pemerintah akan mengalami kurangnya kepercayaan masyarakat dan akan mempertajam isu-isu krusial yang terjadi pada masyarakat pada Pemerintahan Provinsi Papua. Hasil kajian menyangkut hal ini disampaikan oleh Wati, (2010) dan (Claraini, 2017) yang mengatakan bahwa kinerja instansi pemerintah dapat dipengaruhi oleh *Good Governance*.

H₄ : *Good governance* berdampak terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan, Pengawasan dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Peningkatan kinerja suatu instansi pemerintah dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dengan baik. Artinya melalui tata kelola keuangan yang baik dapat memperkuat hubungan antara anggaran dengan hasil yang diharapkan, (Rohman, 2009). Sistem Akuntansi keuangan ialah sebuah prinsip akuntansi yang digunakan berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Fungsi pengawas dapat meringankan beban pemerintah daerah dalam menjalankan tanggungjawabnya dengan melaksanakan kajian, dan penilaian atas program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta juga memberikan rekomendasi dalam upaya perbaikan dan penyimpangan yang ditemukan. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa apabila kinerja instansi pemerintah Provinsi Papua dapat berjalan dengan baik jika didukung pula dengan tata pengelolaan keuangan yang baik dan juga di ikuti dengan sistem pengelolaan akuntansi keuangan serta dilakukan pengawasan baik internal dan eksternal maka dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik pula juga pada Pemerintahan Provinsi Papua. hal ini sejalan dengan pendapat (Fatahurrizak, 2018) yang menyatakan bahwa

pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₅ : Pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan, pengawasan dan *good governance* secara bersama berdampak terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Provinsi Papua.

Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian penjelasan (*eksplanatory*) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menguraikan hubungan antara variabel yang diteliti melalui pengujian hipotesa (Sugiyono, 2014). Pengumpulan data menggunakan metode survey melalui penyebaran instrument penelitian. Populasi yang dilakukan penelitian ini yaitu pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni sebanyak 35 OPD yang ada di Provinsi Papua. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik *Purposive sampling* dengan kriteria antara lain; 1) Pegawai yang lingkup tanggung jawab pekerjaannya berhubungan dengan keuangan yakni; Kepala dinas, Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua dan 2) Pegawai tersebut adalah pegawai yang aktif (tidak cuti atau ijin dalam jangka waktu yang relatif lama) minimal dalam 1 tahun terakhir dengan sampel akhir adalah sebanyak 105 orang pegawai.

Analisis data penelitian dilakukan melalui serangkaian pengujian yang dimulai dari pengujian instrument penelitian (uji validitas dan reliabilitas). Selanjutnya diikuti dengan analisis regresi linier berganda yang diawali dengan pengujian asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas).

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian Validitas Data

Uji validitas menggunakan indeks korelasi *Product Moment Person* dengan taraf signifikan 5%. Artinya jika hasil korelasi lebih kecil dari 0.05 maka instrumen dinyatakan valid dan sebaliknya dengan hasil terlihat pada tabel dibawah ini.

Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Koefisien Korelasi	signifika nsi (2-Tailed)	Ket.
Pengelolaan Keuangan	1	0,754	0,000	Valid
	2	0,808	0,000	
	3	0,742	0,000	
	4	0,780	0,000	
	5	0,660	0,000	
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	1	0,742	0.000	Valid
	2	0,706	0.000	
	3	0,728	0.000	
	4	0,703	0.000	
	5	0,780	0.000	
	6	0,724	0.000	
Pengawasan	1	0,785	0.000	Valid
	2	0,786	0.000	
	3	0,812	0.000	
	4	0,747	0.000	
<i>Good Governance</i>	1	0,742	0.000	Valid
	2	0,733	0.000	
	3	0,703	0.000	
	4	0,768	0.000	
	5	0,738	0.000	
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	1	0,774	0.000	Valid
	2	0,753	0.000	
	3	0,755	0.000	
	4	0,790	0.000	
	5	0,817	0.000	

Hasil pengujian validitas diatas dapat menunjukan bahwa nilai signifikannya dibawah 0.05 yang artinya bahwa setiap item pernyataan yang diteliti Valid.

Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas menggunakan pengujian *Cronbach Alpha* dengan tingkat reliabelnya sebesar > 0.70 dengan hasil penujian reliabilitas terlihat pada tabel dibawah ini.

Hasil Uji Reliabilitas

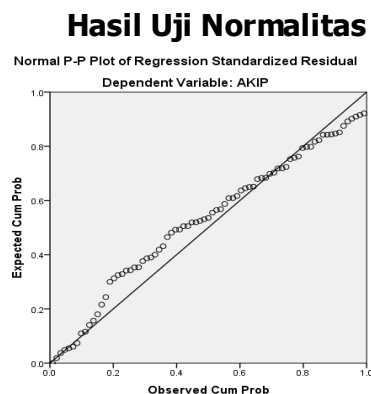
Variabel Penelitian	<i>Cronbach Alpha</i>	Ket
Pengelolaan Keuangan	0,805	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan	0,826	Reliabel
Pengawasan	0,789	Reliabel
<i>Good Governance</i>	0,790	Reliabel
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	0,837	Reliabel

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukan hasil bahwa nilai keofisien *Cronbach Alpha* berada diatas 0.70 sehingga instrument ini layak dikatakan reliabel.

Pengujian Asumsi Klasik

Normalitas

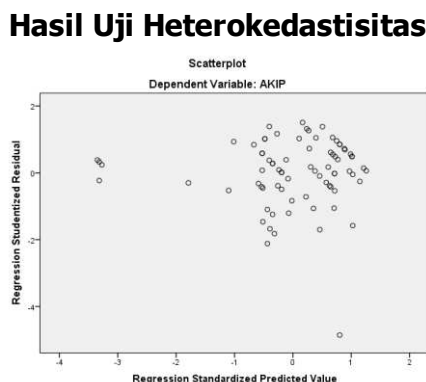
Uji normalitas data dilakukan dengan menganalisis penyebaran data pada gambar Normal P-Plot hasil pengolahan data seperti yang terlihat berikut ini.



Gambar diatas menunjukkan bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang artinya bahwa data dapat dikatakan normal atau memiliki distribusi normal.

Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menganalisis gambar *charts scatterplot* hasil pengolahan data seperti yang terlihat berikut ini.



Gambar *scatterplot* diatas menunjukkan bahwa data penelitian menyebar dan berada baik diatas maupun dibawah titit 0 yang berarti bahwa data dapat dikatakan bebas heterokedastisitas.

Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat besarnya nilai *tolerance* dan VIF hasil pengolahan data penelitian. Artinya apabila nilai *tolerance* mendekati 1 dan nilai VIF dibawah 10 maka data penelitian dapat dikatakan bebas multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas terlihat berikut ini.

Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF
Pengelolaan Keuangan (X_1)	0,252	3,969
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)	0,240	4,166
Pengawasan (X_3)	0,258	3,871
<i>Good Governance</i> (X_4)	0,273	3,664

Hasil pengujian diatas dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini karena nilai *tolerance* tidak lebih dari 1 dan nilai VIF tidak melebihi 10.

Pembahasan

Regresi Linear Berganda

Hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis statistik regresi linear berganda untuk menguji pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, yakni pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, pengawasan dan *good governance* terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat dibawah ini:

Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i> (B)	t hitung	Sig.	Keterangan
<i>Constant</i>	-1,002			
Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1)	0,411	3,408	0,001	Signifikan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)	0,152	1,286	0,202	Tidak Signifikan
Pengawasan (X_3)	0,372	2,198	0,031	Signifikan
<i>Good Governance</i> (X_4)	0,151	1,145	0,256	Tidak Signifikan
<i>R Square</i>	0,752			
<i>Ajusted R Square</i>	0,738			
T tabel	1,675			
F hitung	54, 633			
F tabel	2,557			

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pengelolaan keuangan dengan tingkat signifikansinya adalah ($0,001 < 0,050$) sehingga hipotesis pertama dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Provinsi Papua atau diterima (Terima H_a dan Tolak H_o).

Hasil pengujian hipotesis pertama Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua berorientasi pada sasaran yang baik dan juga proses pengalokasian dana. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian empiris Andarias Patiran, Victor Pattiasina, Muhamad Yamin Noch, Saling, (2021) yang menyatakan bahwa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik sehingga kinerja yang diharapkan pemerintah Provinsi Papua dapat meningkat sehingga program pengelolaan keuangan yang berkaitan antara yang direncanakan dan yang diinginkan dapat tercapai. Temuan ini mendukung hasil penelitian terdahulu oleh (Sari, 2020) bahwa pengelolaan keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun penelitian (Sari, 2020). Tidak sejalan dengan penelitian (Ilyas, 2020). Pengelolaan Keuangan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil dapat di simpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dengan tingkat signifikansinya adalah ($0,202 > 0,050$) sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini dinyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Provinsi Papua atau ditolak (Tolak H_a dan Terima H_o).

Hasil pengujian hipotesis kedua sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah provinsi papua. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa dengan tidak adanya sistem akuntansi yang memadai akan menimbulkan rendahnya objektivitas informasi yang digunakan dan tidak relevan dalam pelaporan keuangan. Temian ini memberi gambaran bahwa sistem akuntansi pada

pemerintah daerah Provinsi Papua belum menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 hingga berdampak pada kurangnya keefektifan dalam pelaporan keuangan di daerah dan mengakibatkan kinerja pada pemerintah Provinsi Papua menjadi menurun. Hasil temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal di Provinsi Papua sehingga belum mampu berkontribusi terhadap peningkatan kinerja instansi-instansinya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pattiasina, 2016).

Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan dengan tingkat signifikansinya adalah ($0,031 < 0,050$) sehingga hipotesis ketiga dinyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Provinsi Papua atau diterima (Terima H_a dan Tolak H_o).

Hasil pengujian hipotesis pertama Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa semua program-program maupun kegiatan operasional pada pemerintah Provinsi Papua dengan adanya pengawasan secara baik pada instansi-instansi pada pemerintah Provinsi Papua telah dimonitoring pada semua tingkatan, yang mana pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi sehingga kinerja instansi pemerintah Provinsi Papua bisa terhindar dari penyimpangan atas kinerja yang diinginkan. Hasil kajian ini mendukung hasil penelitian terdahulu oleh (Sari, 2020) yang juga berhasil membuktikan bahwa pengawasan memiliki dampak yang baik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *good governance* dengan tingkat signifikansinya adalah ($0,256 > 0,050$) sehingga hipotesis ketiga dinyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Provinsi Papua atau ditolak (Tolak H_a dan Terima H_o).

Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa pengelolaan Pemerintah Provinsi Papua yang kurang baik dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat atau pihak lainnya, salah

satu contohnya adalah pemerintah akan mengalami kurangnya kepercayaan masyarakat dan akan mempertajam isu-isu krusial yang terjadi pada masyarakat pada Pemerintahan Provinsi Papua. Temuan ini sejalan dan mendukung hasil penelitian empiris oleh (Trisnaningsih, 2007) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengawasan dan *Good Governance* Secara Simultan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Hipotesis kelima dalam penelitian ini atau yang terakhir menyatakan bahwa pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, pengawasan dan *good governance* memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa apabila kinerja instansi pemerintah Provinsi Papua dapat berjalan dengan baik jika didukung pula dengan tata pengelolaan keuangan yang baik dan juga diikuti dengan sistem pengelolaan akuntansi keuangan serta dilakukan pengawasan baik internal dan eksternal maka dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik pula juga pada Pemerintahan Provinsi Papua. Hasil kajian ini mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Victor Pattiasina, Muhamad Noch Yamin, Andarias Patiran, (2020) bahwa seluruh variabel tereliti tersebut memiliki dampak secara bersama-sama terhadap kinerja instansi pemerintah Provinsi Papua. Hasil penelitian ini selaras dan mendukung hasil kajian oleh (Annisa, 2017) yang juga berhasil membuktikan bahwa sistem akuntansi, pengelolaan keuangan, pengawasan dan *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Pekanbaru

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka simpulan yang dapat disampaikan melalui hasil kajian ini antara lain;

1. Pengelolaan Keuangan berdampak terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berdampak terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

3. Pengawasan berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
4. *Good governance* tidak berdampak terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
5. Pengelolaan Keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, pengawasan dan *good governance* secara bersama-sama berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Pemerintah Provinsi Papua.

Saran

Saran atau rekomendasi yang diberikan berdasarkan simpulan diatas adalah sebagai berikut;

1. Pemerintah Provinsi Papua agar lebih meningkatkan pemahaman pegawai atau aparatur sipil negara terhadap sistem akuntansi keuangan, salah satunya dengan metode adanya pengarahan dari pimpinan kepada bawahanya yang mana dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terutama dalam hal pencatatannya dengan lebih menekankan lagi penggunaan sistem pencatatan yang lebih baik dan benar dan juga transparan sehingga bisa berjalan dengan baik dan optimal.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi pemerintahan mengenai kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua dan penelitian selanjutnya menambahkan jumlah sampel yang lebih banyak lagi sehingga kemampuan penelitian selanjutnya untuk memperlihatkan hasil laporan keuangan yang baik.
3. Penelitian berikutnya diharapkan agar dapat menambahkan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti komitmen organisasi dan transparansi pengelolaan keuangan serta perlu melakukan wawancara secara mendalam agar membantu mengendalikan jawaban tiap responden.

Daftar Pustaka

- Almanda. (2013). Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Skripsi. FE, Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia Bandung. *Jurnal Akuntansi*.
- Andarias Patiran Victor Pattiasina, Muhamad Yamin Noch, Saling, M. B. (2021). Determinan Kinerja Sistem Informasi Akuntansi dimoderasi oleh Pendidikan dan

- Pelatihan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*.
- Annisa, V. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Good Government Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jom FEKON, Vol.4 No.*, 1–13.
- Claraini, C. (2017a). pengaruh good governance, sistem pengendalian intern pemerintah dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Akuntansi*.
- Claraini, C. (2017b). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *JOM Fekon, Vol.4 No.1*.
- Eduard Yohannis Tamaela, Victor Pattiasina, Margaretha B. Dasinapa, Yohanes Marani, J. A. D. (2020). Regional Financial Monitoring Models With Community Participation And Public Policy Transparency As Moderators. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(02), 4223–4232. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I2/PR200745>
- Fatahurrazak. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. *Jurnal Akuntansi*.
- Hidayat, S. S. dkk. (2015). *Panduan Penulisan Skripsi Sarjana* (Edisi Revi). Bandung: Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha.
- Ilyas, A. (2020). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi kasus pada BPKAD di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*.
- Nugroho. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Vol. 7 No. 1. hal. 27-34. *Jurnal Akuntansi*, 7.
- Pattiasina, V. (2016). Determinan Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Future*.
- Putri. (2016). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Ukuran KAP, Audit Tenure dan Report Lag pada Integritas Laporan Keuangan. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. *E-Jurnal Akuntansi*.

- Rohman. (2009). Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemerintah Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Maksi*, 7 (ISSN: 1412-6680).
- Sari. (2020). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, Vol. 17 No, 1–18.
- Siagian. (2007). *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. (Alfabeta.). Bandung.
- Trisnaningsih. (2007). Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Corporate Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. Jawa Timur: Simposium Nasional Akuntansi X Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi*.
- Victor Pattiasina, Muhamad Noch Yamin, Andarias Patiran, M. B. (2020). Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*.
- Wati, E. (2010). Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja Auditor Pemerintah, Purwokerto: Simposium Nasional Akuntansi XIII. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*.